

POLITIK DISALAHGUNAKAN; DEMOKRASI DIPERMAINKAN (STUDI RELEVANSI KONSEP POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI DAN KRISIS POLITIK INDONESIA MENJELANG PEMILU 2024)

Damianus Lesu Kedang¹, Filemon Zakarias Saha²
damyankedang4@gmail.com¹, filemonsaha21@gmail.com²
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menguak isu politik di Indonesia yang mengakibatkan menurunnya kestabilan demokrasi. Hal ini disebabkan karena peran serta penguasa dalam urusan pemilu 2024, yang dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan konstitusi. Sosok yang menjadi fokus perbincangan ini adalah Joko Widodo, presiden Republik Indonesia sejak tahun 2014. Ia merupakan presiden yang berasal dari non elite di Indonesia. Kemunculannya di pentas politik nasional merupakan hasil dari perubahan politik yang memungkinkan pemilihan presiden secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengobati demokrasi yang sakit selama bertahun-tahun. Namun pada akhir pemerintahannya, Jokowi malah mendapatkan cibiran negatif dari berbagai kalangan intelektual, sebab permainan politiknya yang dilakukan secara terang-terangan melukai kembali tatanan demokrasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah, dengan mencari sumber dari berbagai buku dan jurnal serta media online. Dalam tulisan ini juga, penulis mengaitkan kepincangan politik yang terjadi di Indonesia dengan konsep politik Machiavelli karena ada korelasi antara keduanya. Politik Machiavelli mengesampingkan konsep moral dan etika dalam usaha mencapai kekuasaan, serta menghalalkan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Krisis politik yang terjadi menjelang pemilu 2024 tersebut nampak sangat Machiavellian.

Kata Kunci: Politik; Demokrasi; Pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum tahun 2014 telah membuka cakrawala bumi Pertiwi menuju suatu tatanan demokrasi yang semakin sehat. Diselenggarakannya pemilu saat itu mempunyai tujuan agar memperbaiki sistem demokrasi yang sekian lama berada diambang kehancuran. Meskipun tidak mencapai taraf yang sempurna, setidaknya bias mengubah nasib Indonesia menjadi lebih baik.. Dikala itu, pemilu dilakukan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden RI. Momen itu adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan, di mana masyarakat mendapat kesempatan untuk memilih secara langsung, siapa yang pantas menjadi pemimpin tertinggi.

Figur yang menjadi pegangan mayoritas penduduk Indonesia pada pemilu saat itu adalah pasangan Jokowi JK (Joko Wido dan Jusuf Kala). Tampilnya Jokowi di panggung politik membuka peluang bagi seluruh rakyat karena siapapun nantinya bisa menjadi pemimpin. Jokowi adalah sosok yang sederhana, bukan dari kalangan elite politik, dan bukan pengusaha terkenal. Hal ini menjadikannya sebagai Capres favorit, sehingga berpeluang besar mendapatkan suara terbanyak dibandingkan pasangan Prabowo Subinto dan Hatta Rajasa. Hal itu memang benar terjadi Jokowi dan Jusuf Kala berhasil memenangkan pemilu tersebut.

Semasa menjalankan tugas setelah memenangkan pemilu tahun 2014, Jokowi sangat diagung-agungkan di seluruh pelosok tanah air. Keluguan dan kerendahan hatinya, serta kerja nyata yang dilakukannya, terukir indah dalam benak seluruh masyarakat. Kunjungannya ke berbagai daerah menjadi kekhasan tersendiri yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Hal inilah yang menjadi pegangan bagi Jokowi, karena

didukung oleh rakyat, sehingga diusung lagi untuk melaju pada pemilu berikutnya. Dan benar saja, pada pemilu 2019, Jokowi terpilih lagi untuk kedua kalinya menjadi presiden bersama wakilnya Maruf Amin.

Kerja Jokowi dalam dua periode sebagai presiden sangat dinilai positif. Masyarakat sangat menikmati perubahan yang dilakukannya, misalnya pembangunan infrastruktur di Papua. Dengan demikian, Jokowi mendapatkan pujian dari berbagai kalangan masyarakat. Namun, diakhir masa jabatannya, seakan ada permainan politik yang dipertunjukkan secara terang-terangan. Pameran tersebut membuat prahara dan menjadi topik perbincangan bagi para pengamat politik. Ditambah lagi adanya isu politik dinasti yang membuat situasi menjadi semakin memanas. Kericuhan yang terjadi menjelang pemilu 2024, dilihat sebagai sebuah siasat yang sudah diatur sedemikian rapi. Permainan politik nampak jelas seperti suatu upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Satu demi satu upaya tersebut sungguh bertentangan dengan demokrasi. Dalam tulisan ini, penulis mau mengaitkan ketimpangan politik yang terjadi di Indonesia dengan konsep politik Niccolo Machiavelli. Penulis melihat bahwa, konsep politik Machiavelli ada eratkaitannya dengan krisis politik yang menimpa negara Indonesia yang sangat Machiavellian.

Bukan berarti bahwa Indonesai sedang beralih dari paham demokrasi kemudian menganut paham yang dicetus oleh Machiavelli. Namun, ada pihak tertentu yang sadar atau tidak sedang menghidupi konsep pemerintahan menurut Machiavelli tersebut. Bagaimana tidak, siasat yang dilakukan untuk mempertahankan sebuah kekuasaan terlihat sangat Machiavellian. Hal ini membuat negara Indonesia jatuh dalam kepincangan politik yang jauh dari ketentuan demokrasi. Hingga saat ini, masalah ini belum terselesaikan, entah jalan keluar dan kebijakan seperti apakah yang harus ditempuh oleh negara untuk menyelesaikan masalah ini.

METODOLOGI

Dalam penulisan karya ini, penulis hanya menggunakan metode penelitian berdasarkan studi kepustakaan dan mencari referensi dalam berbagai media online. Dalam metode ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari dan membaca, serta mendalami literatur tentang konsep politik Machiavelli dan krisis politik dan demokrasi di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, penulis kemudian membuat perbandingan dan hasilnya adalah adanya hubungan antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Politik Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli lahir di Firenze pada 3 Mei 1469, dan merupakan anak pasangan jaksa Bernardo di Niccolo Machiavelli dan Bartolomea di Stefano Nelli. Machiavelli merupakan negarawan Italia dan pada masanya itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Florence. Kondisi perpolitikan Florence pada masa kehidupan Machiavelli tidaklah bisa dikatakan bagus. Pengaruh zaman Rennaisans juga turut memperburuk kondisi sosial kala itu. Umumnya, masyarakat mulai melepaskan diri dari kungkungan Gereja dan paham skolastik. Pada zaman ini moral mulai tidak diperdulikan sehingga seringkali terjadi pengkhianatan. Hasrat untuk berkuasa secara wajar tidak lagi diperdulikan. Masa renaisans menumbuhkan kecurigaan-kecurigaan di kalangan sesama kawan, sampai pada taraf pemerintahan (Zein, 2020).

Berdasarkan kondisi sosial yang terjadi pada masa kehidupannya, akhirnya mempengaruhi pandangannya mengenai politik dan mencetuskan konsep politiknya secara ekstrim. Sesuai dengan kondisi lingkungannya tersebut, Machiavelli menyumbangkan

pandangannya tentang bagaimana caranya seseorang untuk mempertahankan kekuasaannya. Demi mencapai hal tersebut, seorang penguasa harus keluar dari persoalan moral dan etika yang mengikat segala aspek kehidupan. Hal inidijurkan Machiavelli karena ia sendiri menolak ajaran agama tentang moral dan etika, salah satunya adalah moral dan etika Katolik. Ia menganggap etika Katolik tidak mendatangkan manfaat. Ia menyatakan bahwa etika Katolik hanya menjadikan manusia lemah karena hanya mengorientasikan hidupnya pada hal-hal yang bertolak dengan realitas duniawi . Hal ini menurutnya tidak memberikan kontribusi nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan (Zein, 2020).

Menurut Machiavelli, penguasa bijak hendaknya menanamkan dalam dirinya sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, tidak memperdulikan akankah ia akan dicintai atau dibenci. Seorang penguasa harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapa pun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yaitu kebaikan Negara (Atthahara, 2019). Bagi Machiavelli, kekuasaan haruslah diperoleh, digunakan dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri di mana segala kebijakan, agama, moralitas justru harus dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Penguasa yang baik harus berusaha mengejar kekayaan dan kejayaan karena keduanya merupakan nasib mujur yang dimiliki seorang penguasa (Atthahara, 2019).

Dari semua konsep pemikiran Machiaveli, pada dasarnya bahwa ia hanya berfokus pada bagaimana caranya untuk mempertahankan kekuasaan. Ia menolak sama sekali konsep moral dalam struktur pemerintahan. Baginya politik dan moral merupakan dua bidang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Yang diperhitungkan hanyalah sukses. Machiavelli hanya mengenal satu kaidah etika politik: yang baik adalah apa saja yang memperkuat kekuasaan raja. Segala apa yang melayani tujuan tersebut harus dibenarkan (Franz Magnis Suseno, 1988). Dalam konsep ini, Machiavelli dinilai sangat sinisme karena hanya mementingkan keabadian kekuasaan seorang pemimpin. Namun, baginya hal ini sangat baik demi kepentingan negara, karena baginya tindakan-tindakan yang jahat pun akan dimaafkan oleh masyarakat, asal sang pemimpin mencapai sukses (Franz Magnis Suseno, 1988). Bagaimanapun juga, menurut Machiavelli, seorang pemimpin atau raja itu bukan semata-mata mengukuhkan kekuasaan saja, tetapi juga memperoleh keagungan dan kemuliaan (Maiwan, 2019).

Kestabilan dan keselarasan jalan suatu pemerintahan, tidak tergantung dari pengawasan masyarakat. Pemerintahan akan berjalan lancar apabila dikendalikan secara penuh oleh penguasa. Machiavelli tidak melihat bahwa stabilitas kekuasaan tergantung dari apakah kekuasaan dipandang sebagai sah atau tidak oleh masyarakat (Franz Magnis Suseno, 1988). Jika seorang pemimpin mau agar jabatannya tetap langgeng, maka harus mendengarkan dan memenuhi segala harapan rakyat. Namun pendekatan ini dinilai sangat sempit oleh Machiavelli. Baginya, apabila seorang pemimpin terus-terusan memenuhi permintaan rakyat, maka ada suatu waktu seorang pemimpin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya yang memadai. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus terlebih dahulu mempertahankan kekuasaannya ketimbang memperhatikan masyarakat. Meskipun konsep politik yang dilihat sangat sinis ini, tidak mungkin juga akan mati tertelan zaman yang lebih berpedoman pada nilai moral dan etika. Konsep Machiavelli ini tidak sekedar pemikiran pribadinya saja, tetapi bisa saja dihidupkan di masa mendatang.

Suatu fenomena modern yang terjadi dan dilihat sangat menghidupi konsep politik Machiavellian, sedang terjadi di tanah air Indonesia dan terlihat ada kemiripannya. Ada sebuah kerja pemerintahan yang berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya dengan

berbagai cara. Cara-cara tersebut dipertunjukkan secara halus dan rapi, sehingga awalnya tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Semua masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan menjadi terpicu dan tertarik dengan masa pemerintahan tersebut. Namun, pada akhirnya permainan tersebut seakan diumbar secara terang-terangan. Dengan demikian, menimbulkan keresahan dimana-mana, terutama bagi para kaum cendekiawan yang kemudian menyuarakan adanya kepincangan politik sehingga mengakibatkan rusaknya tatanan demokrasi.

2. Krisis Politik dan Demokrasi Indonesia Menjelang Pemilu 2024

Konsep negara yang menggugat sistem demokrasi, wacana sekitar politik Indonesia dan segala dinamikanya, menjadi tema hangat yang mengguncang tanah air salah satunya adalah krisis politik menjelang pemilu 2024. Topik yang hangat diperbincangkan oleh semua kalangan akademik kemarin, diakibatkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang seharusnya itu tidak boleh dilakukannya. Problem yang terjadi berawal semenjak seruan rakyat untuk terus mengangkat dirinya (Jokowi) melanjutkan pemerintahan pada periode ketiga, yang mungkin ia pun menginginkan hal tersebut, namun tidak direspon oleh konstitusi. Akhirnya Jokowi menempuh jalan lain dan berusaha melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Namun, semua alur permainan politik tersebut terlihat jelas, bahwa sudah dimulai sejak masih menjalankan masa pemerintahannya, misalnya merubah UU tentang syarat menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2017.

Ketika Jokowi bersama Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden-wakil presiden pada 20 Oktober 2014, publik Indonesia memiliki harapan yang tinggi padanya, karena ia adalah figur yang dianggap reformis, bebas korupsi, dan bagian dari generasi baru yang terbebas dari politik dinasti (Zaman, 2020). Harapan masyarakat ini memang terbukti selama dua periode jabatannya. Jokowi nampaknya menjalankan pemerintahannya secara bersih dan mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat terpicu sesuai dengan misinya, yaitu hilirisasi. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah Jokowi seakan memudari citranya sendiri dengan mencampuri urusan pemilu 2024 dan memisahkan dirinya dengan partai PDI-P yang mengusungnya selama dua periode, serta menghidupi politik dinasti yang secara perlahan tidak disadari masyarakat.

Jokowi yang memisahkan diri dari PDI-P menjadi awal mula semua persoalan. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan presiden Joko Widodo dengan PDI-P diduga disebabkan oleh hal sederhana. Persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan (Aditya, 2023). Permintaan Jokowi ini jelas ditolak oleh pihak PDI-P karena akan melanggar konstitusi. Selain itu, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak mau mengkhianati konstitusi. PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia (Aditya, 2023a).

Persoalan ini mengakibatkan hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo menjadi memanas. Hal penolakan tersebut kemudian mengakibatkan Jokowi secara cepat berubah; ia mulai tidak peduli lagi dengan PDI-P. Dari sini kemudian berlanjut dengan pemisahan diri, dan mulai mendukung partai politik lainnya. Ini sama halnya dengan pengkhianatan karena Jokowi tidak menghargai partai pendukungnya yang membesarkannya dalam dunia politik, malah berpaling begitu saja. Belum teratasi sebab persoalan tersebut, muncul lagi persoalan baru, bahwa kader PDI-P Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain adalah putra sulung Jokowi dideklarasikan sebagai bakal wakil calon

presiden bersama Prabowo Subianto. Hal ini menambah kekecewaan pihak PDI-P meskipun secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI-P telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (Aditya, 2023b). Gibran sendiri belum keluar atau belum dipecat dari kader PDI-P, namun mengambil suatu langkah untuk memisahkan diri, kemudian bergabung dengan partai lain yang mengusung dirinya untuk siap menjadi wakil presiden pada pemilu 2024. Partai pengusung Gibran itu adalah Golkar yang tidak lain adalah saingan dari PDI-P.

Pengusungan Gibran oleh partai Golkar menjadi suatu isu tak terduga, sebab terjadi sekilas saja. Gibran yang diduga tidak ada hubungannya dengan partai Golkar, serentak mengangkatnya dan mendukungnya menjadi calon wakil presiden bersama pasangan presiden Prabowo Subianto. Jika ditelusuri lebih lanjut, dalam momen ini ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto tengah mengalami kasus korupsi setelah beberapa kali dilakukan penyelidikan. Kejaksaan Agung menemukan penyelewengan dalam pengambilan kebijakan penyelesaian kelangkaan minyak goreng. Airlangga diduga mempengaruhi sejumlah kebijakan kelangkaan minyak goreng yang menguntungkan perusahaan kelapa sawit (Amirullah, 2023). Dalam majalah media Indonesia, dituliskan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto semakin menguat usai dirinya diperiksa 12 jam oleh Kejaksaan Agung. Kasus tersebut akan semakin memperburuk elektabilitas partai Golkar di tahun Politik. Apalagi berdasarkan beberapa survei Golkar memang cenderung mengalami kemerosotan (Utami, 2023). Hal ini menjadi kesempatan emas yang dimanfaatkan Jokowi, agar Golkar secepatnya mengusung dan mendukung Gibran agar Airlangga bisa terlepas dari kasus korupsi tersebut. Tentu saja ini adalah sebuah taktik yang sudah diatur supaya pencalonan Gibran berjalan lancar.

Selain itu, persoalan yang aktual sekaligus hangat diperbincangkan menjelang pemilu 2024 adalah persoalan politik dinasti. Politik dinasti ini sudah dimulai sejak Bobby dan Gibran ikut serta dalam kontestasi politik lokal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menimbulkan pro dan kontra dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia. Tentunya ini disebabkan karena keduanya merupakan keluarga presiden yang sedang menjabat yaitu Presiden Joko Widodo (Aan Suryatwan, 2023). Gibran (anak sulung Jokowi) ikut serta dalam pemilihan walikota Solo, sedangkan Bobby Nasution (menantu Jokowi) memastikan diri ikut dalam pemilihan walikota kota Medan. Keduanya maju dalam kontestasi Pilwalkot periode 2020-2024. Hal ini yang kemudian membuat pembicaraan di masyarakat tentang munculnya politik dinasti Presiden Jokowi dan merubah citra kepemimpinannya yang selama ini melekat sebagai presiden yang tidak melibatkan keluarga dalam urusan politik (Aan Suryatwan, 2023).

Dinasti politik, yang oleh masyarakat dianggap sebagai virus demokrasi pada awalnya muncul optimisme, penyakit ini akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai penguasa karena dia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun anggapan itu ternyata salah, karena Jokowi telah tertular virus elit politik masa lalu yang melakukan nepotisme dan politik dinasti. Jokowi telah merestui anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon walikota Solo (Gunanto, 2020). Langkah awal ini ditempuh Jokowi agar mempermudah jalan Gibran nantinya menuju tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi. Benar saja, Gibran kemudian diangkat oleh Prabowo untuk menjadi pasangan calon presiden. Persoalan ini banyak mendapat cibiran dan banyak pihak yang tidak setuju karena Gibran masih terlalu muda. Namun, pengangkatan Gibran tersebut tidak menjadi persoalan berat sekaligus dilindungi, sebab dalam UU sudah ditetapkan peraturan baru mengenai syarat menjadi presiden dan wakil presiden (UU No 7 tahun 2017 Pasal 169 tentang Pemilihan Umum).

Wacana ini sempat heboh, sehingga muncul pihak-pihak yang menggugat batas usia syarat Capres-Cawapres tersebut. Namun dalam persidangan malah diperkuat oleh putusan MK; Anwar Usman menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres tersebut. Bagaimanapun juga Anwar Usman tetap mempunyai kekuatan hukum karena sudah ditetapkan. Pasal 169 huruf q itu telah dimaknai atau ditambahkan normanya oleh MK melalui putusan nomor 90 sebagai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (MK Tolak Gugatan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres Putusan Kontroversial Anwar Usman Tetap Mempunyai Kekuatan Hukum, 2023). Peraturan tersebut membuka pintu gerbang bagi Gibran untuk terus melaju menjadi calon presiden bersama pasangannya Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Tentu saja politik dinasti jelas dalam persoalan ini, Anwar usman yang tampil menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres tersebut sekaligus membuka jalan untuk Gibran, tidak lain adalah paman Gibran atau adik ipar dari Jokowi.

Akhir upaya dari Jokowi untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo-Gibran adalah dengan membagi-bagi bansos. Dalam konteks ini, Jokowi seakan menerapkan paham Meritokrasi agar masyarakat tersanjung dengan kebajikannya. Kebaikan ini hanya semata-mata sebagai iming-iming agar masyarakat terpicat padanya, kemudian memilih putranya yang nantinya meneruskan pemerintahannya. Persoalan mengenai bansos ini sama sekali tidak menguntungkan paslon nomor urut 1 dan 3. Hal ini berimbas pada pengajuan sengketa dari kedua kubuh mengenai kecurangan tersebut yang dilantunkan kepada hakim untuk ditindaklanjuti meskipun pemilu sudah usai dilaksanakan. Namun, dalam putusan akhir Mk tidak terbukti sama sekali bahwa bansos menjadi sarana untuk memenangkan paslon nomor urut 2.

KESIMPULAN

Sosok Jokowi bisa dikatakan sebagai Machiavelli moderen. Segala upaya yang ditempuhnya untuk melanggengkan jabatannya, terlihat sangat Machiavellian. Dirinya yang menginginkan tiga periode sebetulnya tidak gagal meskipun ditolak oleh PDI-P dengan alasan konstitusi. Dirinya yang menginginkan jabatannya tetap langgeng sesungguhnya berjalan sesuai rencana. Jabatannya menjadi seorang presiden memang akan segera berakhir. Dengan demikian, berbagai cara pun ia tempuh agar mewariskan jabatannya tersebut kepada putra sulungnya sebagai representasinya agar kekuasaannya tetap hidup. Demikian siasat yang dianjurkan oleh Machiavelli dalam usaha melanggengkan kekuasaan, bahwa seorang pemimpin harus menempuh jalan apapun demi kejayaannya. Segala cara yang ditempuh Jokowi untuk memenangkan anaknya tentu berseberangan dengan konsep Machiavelli yang tidak mengikut sertakan aspek moral, karena Jokowi sendiri hanya fokus pada kesejahteraan keluarganya (politik dinasti).

Kini semuanya telah usai. Putusan MK telah mengakhiri segala pergulatan politik yang terjadi di tanah air Indonesia. Kedua kubuh yang kalah dalam pemilu telah mengucapkan selamat kepada kubuh Prabowo-Gibran sebagai pemenang. Harapannya agar Prabowo-Gibran bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun juga kemenangan mereka adalah kemenangan dari hasil suara rakyat. Rakyat sendiri telah menentukan pilihannya. Oleh karena itu, rakyat yang menjadi penentu kemenangan akan menjadi penuntut kebijakan. Tentu saja kita semua mengharapkan pemimpin yang bertanggung jawab, selalu menyertakan aspek moral dan etika dalam segala urusan politik, dan tentunya mendahului kepentingan masyarakat ketimbang individu agar demokrasi tidak selalu dalam ambang kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Suryatwan. (2023). Dinasti Politik Pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby. *Journal Publicuho*, 3, 2.
- Aditya, N. R. (2023a). Adian Napitupulu Ungkap Persoalan Jokowi dan PDI-P Bermula dari Ditolaknya Permintaan Presiden 3 Periode. *Kompas*.
- Aditya, N. R. (2023b). Secara De Facto Gibran Tak Lagi di PDI-P, tetapi Tak Ada Pemecatan. *Kompas*.
- Amirullah. (2023). Mentri Airlangga Hartarto dalam Pusaran Korupsi Izin Ekspor CPO. *Tempo*.
- Atthahara, H. (2019). Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jurnal JISIPOL*, 4, 6.
- Franz Magnis Suseno. (1988). *Moran dan Kuasa*. PT Gramedia.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 8, 4.
- Maiwan, M. (2019). Antara Virtue Dan Fortune: Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 1, 57.
- MK Tolak Gugatan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres Putusan Kontroversial Anwar Usman Tetap Mempunyai Kekuatan Hukum, (2023).
- Utami, S. (2023). Dugaan Kasus Korupsi Airlangga Hartarto Pengaruhi Elektabilitas Golkar. *Media Indonesia*.
- Zaman, A. N. (2020). Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional. *Jurnal UMJ*, 1, 10.
- Zein, F. M. (2020). Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi)". *Jurnal Mahkamah*, 1.